



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Nurhaerurrijal Amin, *Eksistensi Grasi Sebagai Bentuk Upaya Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Pidanaaan*, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015.
- Bachtiar Baital, *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I. No.1 Juni 2014.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi-Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Jakarta; Universitas Atma Jaya, 2009.
- C.S.T. Kansil dan chistine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- , *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 2011.
- Dahlan Thaib Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dientia Dinneer, *Pemberian Grasi Terhadap terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.
- Dwi Purnama Wati, *“Implikasi Pembatalan Perubahan Regulasi Grasi Terhadap Eksekusi Pidana Mati”*, Skripsi, Lampung: Fakultas Hukum Lampung, 2016.
- Diyah, *“Hak Prerogatif Presiden”*, <http://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018.
- Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandandingan Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010.
- Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, *Panduan Penyusunan Skripsi*, Pekanbaru: Fasih, 2014.
- Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State/Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- _____, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2007.
- H.Ibrahim, *Hak Prerogatif Presiden, Karena Negara (Bukan) Saya*, <Http://H.Ibrahim> Hak Prerogatif Presiden, Karena Negara (Bukan) Saya mantap.htm, diakses pada 25 Januari 2018.
- Hilman Adikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Hukum Online, *Mengenal Hak Prerogatif*, [Http: // m. hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal-hak-prerogatif](Http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal-hak-prerogatif) diakses pada tanggal 29 Maret 2018.
- I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah konstitusi*, Bandung: PT. Alumni, 2008.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaWali Pers, 2014.

Jazim Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

J.E. Sahetapy, *Mekanisme Pengawasan atas hak-hak Presiden*, http://www.komisi Hukum. Go. Id/atice_Opinion Php?mode=detil&Id, diakses tanggal 31 Maret 2018.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

—————, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Johan Unpal, *Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945*, Http : // johanunpal .blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945_4.html?m=1 diakses pada tanggal 29 April 2018.

Jrank, [Href="http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon_Terminology etymology.html"](http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon_Terminology_etymology.html)Amnesty and Pardon-Terminology And Etymology/a, diakses tanggal 04 Maret 2018.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kaharuddin, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23. No.2, Desember 2016.

K.C Wheare, *Modren Constitution/ Konstitusi Modren*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Kemendiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http : // bahasabahasa.kemendiknas. go. Id /kbbi/index.php> dilihat pada Senin, 12 Maret 2018.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Limcau, “*Penjelasan Rumusan Pasal 10 dan 11 UUD*”, <http://www.blog.limc4au.com/2012/12/penjelasan-rumusan-pasal-10-dan-11-uud.html?m=1> diakses pada selasa pada tanggal 25 Maret 2018

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Mei Susanto, “*Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden, Pengertian, dan karekter hakPrerogatif*”, <http://www.google.co.id/amp/s/meisusanto.com/2014/10/14/mm>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahami-istilah-hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-karakter-hakprerogatif/amp diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

_____, *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Yudisial Vol.9 No.3 Desember 2016.

M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1995.

Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia, 2008.

M. Jamhuri, *Analisis Yuridis terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 194*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II No. 2 Oktober 2015 diakses pada tanggal 21 April 2018.

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Selatan: Sinar Bakti, 1988.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

_____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontraversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

_____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* Jakarta: Rajawali Pers 2010.

MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016.

_____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2016.

Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008.

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

Niklas Bantika, *Pemberian Grasi oleh Presiden Indonesia Berdasarkan Undang-Undang negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal, diakses pada tanggal 25 Maret 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nimatul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Pres, 2007.
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Oksep Adhayanto, *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amndemen UUD 1945*, Jurnal, FISIP UMRAH Vol.2, No.2, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktet*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Prerogative”TheFreeDictionary<http://legaldictionary.thefreedictionary.com/prerogative>, di undih pada tanggal 27 Maret 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakaarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rikosyahrudin, “*Hak Prerogatif Presiden dalam UUD 1945*”, <http://rikosyahrudin.blogspot.co.id/2014/11/hak-prerogatif-presiden-dalam-uud-1945.html?m=1>, diakses pada tanggal 29 April 2018.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susilo Sueharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

_____, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Triana Putrie Vinansari, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di Indonesia*, Jurnal hukum pidana Fakultas Hukum universitas Sumatera Utara, Medan 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Perubahan).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan).

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Untung Dwi Hananto, *Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945*, Jurnal MMH. Jilid 42. No.2, April 2013.

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008.

Widodo Ekatjahjama, *Peraturan Peerundang-Undnagan Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Wiki, *Prerogatif*, [Http://id.wikipedia.org/wiki/prerogatif](http://id.wikipedia.org/wiki/prerogatif) diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

Winarno Narmoatmojo, *Pancasila dan UUD 1945*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009.